UNIVERSITAS GADJAH MADA

POLICY BRIEF

KETAHANAN PANGAN DI UJUNG TANDUK: KRISIS REGENERASI PETANI DI INDONESIA

Disusun Oleh : Nur Rani - 24/539338/PSP/08361

Policy brief ini ditujukan kepada:
Kementerian Pertanian Republik Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia menghadapi krisis regenerasi petani yang ditandai oleh semakin sedikitnya petani muda dan dominasi petani berusia di atas 45 tahun. Kondisi ini diperparah oleh tiga isu utama: sektor pertanian kurang menarik bagi generasi muda, pendapatan petani rendah dan tidak kompetitif, serta minimnya adopsi teknologi modern membuat produktivitas stagnan. Jika tidak ditangani, sebagian besar petani akan memasuki usia nonproduktif dalam 10–20 tahun ke depan, berpotensi menurunkan kapasitas produksi pangan nasional. Ancaman ini mencerminkan prinsip dasar "no farmer, no food", bahwa krisis regenerasi akan berdampak langsung pada ketahanan pangan Indonesia. Untuk menjawab masalah tersebut, policy brief ini mengusulkan tiga kebijakan utama: Insentif Dasar untuk Petani Pemula, Magang Bersertifikat, dan Skema Alih Usaha Tani Nasional, yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik profesi petani, memperkuat pendapatan dan akses aset, serta mempercepat modernisasi pertanian. Policy brief ini menawarkan solusi yang feasible secara politik, terukur secara ekonomi, dan memiliki dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan.

MASALAH UTAMA

Gambar 1. Komposisi Petani Berdasarkan Umur

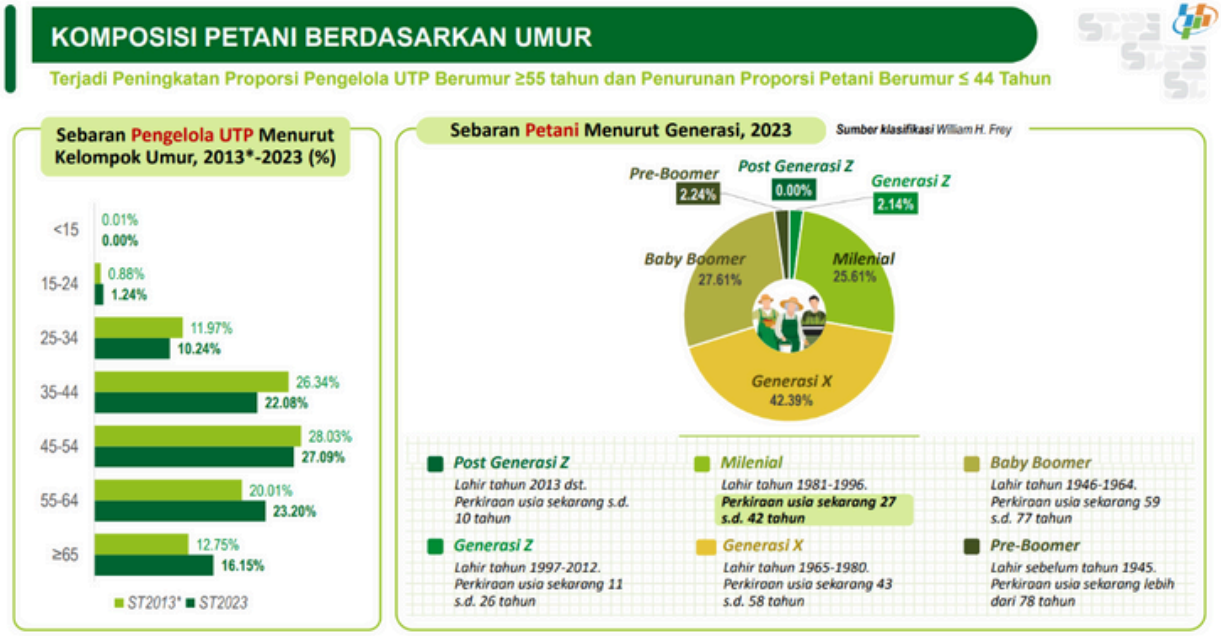

Sumber: BPS, Juli 2023

Berdasarkan Gambar 1. data komposisi petani berdasarkan umur dan generasi menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis regenerasi petani. Pada 2023, lebih dari 39% petani berusia di atas 55 tahun, sementara kelompok petani muda (sekitar 34 tahun) hanya mencapai 11% dan terus menurun sejak 2013. Dominasi Generasi X (42,39%) dan Baby Boomer (27,61%) menegaskan bahwa tenaga kerja pertanian semakin menua. Sementara itu, partisipasi generasi milenial hanya 25,61% dan Gen Z bahkan kurang dari 3%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tualar (2019) menjelaskan mayoritas petani berada pada rentang usia 45–54 tahun, sementara minat generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian terus menurun. Selain itu, praktik pertanian masih didominasi teknologi konvensional yang menyebabkan produktivitas dan daya saing tetap rendah. Ditambah lagi, tingkat pendidikan petani yang relatif terbatas membuat profesi ini kurang menarik sebagai pilihan karier jangka panjang.

Rendahnya keterlibatan generasi muda dan meningkatnya proporsi petani lansia menandakan terhambatnya regenerasi tenaga kerja pertanian. Kondisi ini mengancam keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan nasional, padahal sektor pertanian merupakan penopang utama penyediaan pangan, penyerap tenaga kerja terbesar, sekaligus penggerak ekonomi perdesaan. Jika tidak segera ditangani, Indonesia berisiko mengalami penurunan produktivitas pertanian di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat, seiring proyeksi jumlah penduduk yang mencapai 324,05 juta jiwa pada tahun 2045.

Indonesia merupakan negara agraris yang sedang menghadapi tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Berdasarkan data dari BPS (2023), rata-rata petani Indonesia berusia 45-54 tahun. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya *aging farmer* yang disebabkan *oleh* krisis regenerasi petani, di mana generasi muda tidak memiliki memotivasi untuk terlibat dalam pertanian.

PENYEBAB PERMASALAHAN

Sektor Pertanian Tidak Menarik Bagi Generasi Muda

Minat generasi muda untuk berkarier di sektor pertanian cenderung rendah karena profesi petani dipersepsikan kurang menjanjikan secara ekonomi dibandingkan pekerjaan lain (Mulyana et al., 2022; Mariati & Nugroho, 2022). Dr. Hempri Suyatna menegaskan bahwa regenerasi petani terhambat karena sektor pertanian kalah bersaing dengan lapangan kerja yang dianggap lebih stabil dan berprospek jelas. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam menarik minat generasi muda untuk masuk ke dunia pertanian. Selain itu, pertanian kerap dipandang tidak kompetitif dan memiliki risiko kegagalan usaha yang lebih tinggi (Dwipradnyana, 2017).

Gambar 2. Transformasi Proporsi Tenaga Kerja, Tahun 1970 - 2020

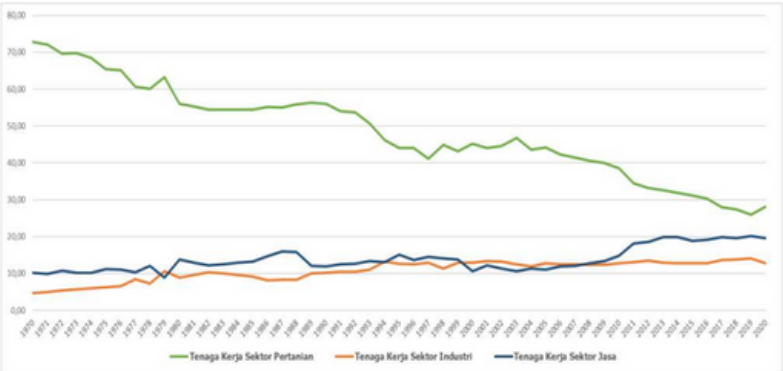

Sumber: Kementerian Pertanian, 2023

Berdasarkan Gambar 2. menunjukan adanya penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dari tahun 1970-2020 yang cukup signifikan.

Hambatan regenerasi juga dipengaruhi oleh stereotip sosial. Profesi petani sering dikaitkan dengan dua stigma utama (Oktafiani et al., 2021). Pertama, pertanian dianggap sebagai domain laki-laki, di mana mereka lebih dominan dalam kepemilikan lahan, sementara perempuan dipersepsikan memiliki kontribusi terbatas, terutama dalam pengelolaan dan pemasaran hasil. Kedua, profesi petani kerap diidentikkan dengan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga tidak menarik sebagai pilihan karier.

Gambar 3. Distribusi Pengelola Usaha Pertanian Berdasarkan Umur Pengelola (persen), 2013–2023

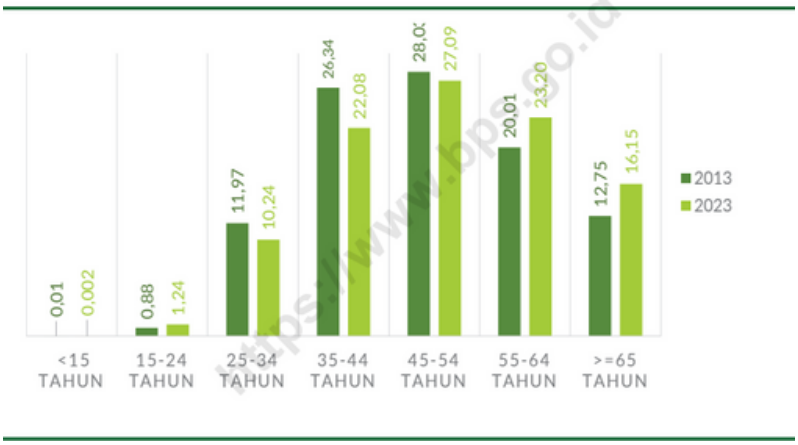

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian

Hal ini berpengaruh terhadap distribusi pengelola usaha pertanian berdasarkan umur pengelola yang dapat dilihat pada Gambar 3 didominasi umur 45-54 tahun dengan presentasi 27,09%. Sehingga separuh petani berusia diatas 45 Tahun.

Akumulasi hambatan tersebut berkontribusi pada menurunnya produktivitas dan output pangan. Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan tren penurunan jumlah petani dan Usaha Pertanian Perorangan (UTP), yang jika tidak ditangani akan menyebabkan penyusutan lahan budidaya aktif, penurunan produksi komoditas utama (padi, jagung, hortikultura), serta meningkatnya risiko volatilitas harga dan inflasi pangan.

ISU PERMASALAHAN

Rendahnya Pendapatan Petani

Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan buruh/karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Rupiah)

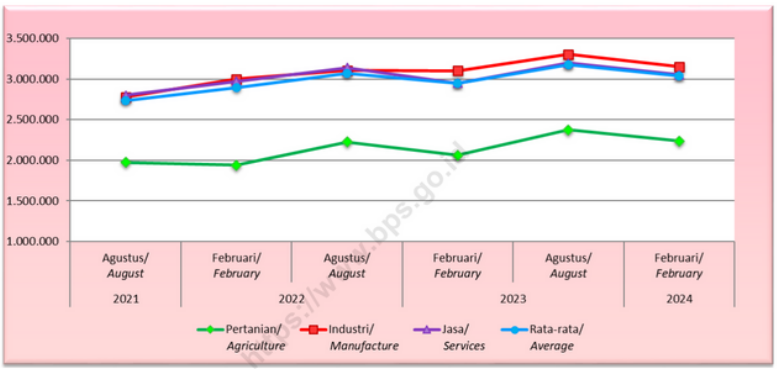

Rata-rata upah/gaji bersih sebulan sektor pertanian berkisar 2 juta. Berbeda dengan sektor industri dan jasa berkisar 2,5 juta-3,5 juta. Dimana penghasilan petani dibawah rata-rata. Dengan sistem kerja yang non formal sehingga tidak ada jaminan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan tunjangan seperti pada sektor lainnya.

Sumber : Sakernas 2021-2024

Kondisi tersebut membuat banyak pemuda memilih pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan. Rendahnya pendapatan petani tidak lepas dari produktivitas yang masih rendah, kepemilikan aset produktif yang minim, serta terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% dari 8.000 responden petani yang dapat mengakses kredit perbankan. Sebagian besar (52%) masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, atau lembaga keuangan non-bank, sementara 33% lainnya bergantung pada pembiayaan program pemerintah seperti PNPM dan KUR (Kementerian Pertanian RI, 2020). Kondisi finansial yang serba terbatas ini turut mempercepat penyusutan tenaga kerja pertanian; dalam 10–20 tahun ke depan sebagian besar petani diproyeksikan memasuki usia nonproduktif. Tanpa regenerasi yang kuat, Indonesia berpotensi menghadapi situasi no farmer, no food.

Minimnya Inovasi Teknologi Pertanian

Minimnya inovasi teknologi pertanian tidak terlepas dari semakin berkurangnya petani muda yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi modern. Penurunan jumlah tenaga muda ini berdampak langsung pada lambatnya adopsi teknologi dan menurunnya produktivitas tanaman pangan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian, pelatihan, dan infrastruktur pendukung membuat produktivitas petani tetap rendah dan semakin mengurangi minat generasi muda untuk terjun ke sektor ini (Polan et al., 2021). Kondisi tersebut tercermin dari masih tingginya impor komoditas pangan strategis pada tahun 2023, seperti beras sebesar US$1.776.781.068 (naik 811,07%) serta kacang hijau sebesar US$118.220.747 (naik 14,51%). Sementara itu, jagung, kacang tanah, dan kedelai juga masih mengandalkan pasokan luar negeri meskipun trennya menurun (BPS, 2024).

Menyusutnya tenaga kerja pertanian dan lambatnya regenerasi membuat produksi domestik semakin sulit memenuhi kebutuhan nasional, sehingga risiko defisit pangan dan ketergantungan pada impor semakin besar. Ketergantungan ini juga meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap fluktuasi harga internasional. Upaya penerapan pertanian pintar (smart farming) pun menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya penerimaan petani, tingginya biaya investasi, keterbatasan akses internet, hingga kurangnya kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital. Kompleksitas teknologi yang memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar serta rendahnya kualifikasi tenaga kerja pedesaan turut memperlambat transformasi ini (Rachmawati, 2021).

REKOMENDASI

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Prabowo dan Gibran sebagai upaya pencapaian sasaran prioritas nasional 2 yaitu swasembada pangan dilaksanakan melalui penguatan regenerasi petani.

Insentif Dasar untuk Petani Pemula 17–35 Tahun

Indonesia belum memiliki insentif awal yang secara khusus dirancang untuk menarik pemuda masuk ke profesi petani. Selama ini, bantuan pemerintah seperti alat mesin, pelatihan, atau KUR tidak cukup untuk membuat sektor pertanian terlihat menjanjikan bagi generasi muda karena tidak menyasar masalah mendasar: sulitnya akses lahan, modal awal, dan tidak adanya jalur karier yang jelas. Melalui program Insentif Dasar Petani Pemula, pemerintah memberikan "beasiswa profesi" agar bertani menjadi pilihan karier yang layak dan kompetitif. Menarik pemuda untuk memulai profesi petani dengan memberikan dukungan awal yang nyata dan terukur yaitu subsidi akses lahan 1–2 hektare selama 3 tahun pertama, asuransi pendapatan dasar untuk komoditas pangan, hibah input produksi (non-hutang), membantu petani pemula menguasai teknis produksi dan manajemen usaha. Konsep insentif yang dirancang seperti beasiswa karier untuk menarik minat generasi muda. Aktor pelaksana kebijakan adalah Kementerian Pertanian (pelaksanaan) dan Kemenkeu (dukungan fiskal).

Magang Bersertifikat dengan Upah Standar Industri

Saat ini Indonesia belum memiliki sistem magang pertanian berbayar yang terstandar secara nasional, padahal sektor industri dan teknologi sudah menerapkannya. Kebijakan ini menyediakan jalur pelatihan profesional selama 6–12 bulan pada *farm modern*, BUMN pangan, perusahaan benih, atau *startup agri-tech*, dengan upah minimal setara UMK. Peserta memperoleh sertifikasi nasional *Young Agricultural Professional*, keterampilan teknologi pertanian modern, dan kontrak penempatan kerja selama satu tahun pascamagang. Kebijakan ini mengatasi stereotip bahwa pertanian tidak memiliki jalur karier profesional. Dengan memberikan pengalaman kerja setara industri digital, minat dan partisipasi pemuda di sektor pertanian dapat meningkat signifikan. Aktor pelaksana adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, BUMN Pangan.

Skema Alih Usaha Tani Nasional

Indonesia belum memiliki kebijakan nasional yang menghubungkan petani lansia yang tidak memiliki penerus dengan generasi muda yang ingin bertani. Skema ini mengadopsi praktik sukses di Jepang dan Korea. Melalui kebijakan ini, pemerintah memfasilitasi: registrasi petani berusia diatas 55 tahun yang siap mengalihkan usaha taninya, skema *profit-sharing* dan masa transisi 3–5 tahun, dukungan hukum serta pembiayaan untuk pengalihan lahan dan alat produksi. Penerima program adalah petani muda tersertifikasi. Skema ini menjawab menurunnya jumlah petani muda, risiko berkurangnya lahan pertanian aktif, serta minimnya akses pemuda terhadap aset produktif. Dengan suksesi usaha tani yang terstruktur, keberlanjutan produksi pangan nasional dapat lebih terjamin. Aktor pelaksana adalah Kementerian Pertanian, ATR/BPN, Pemerintah Daerah

REFERENSI

- Dwipradnyana, I. M. (2017). Tantangan berat regenerasi petani Bali dalam mempertahankan Subak sebagai warisan budaya dunia. Agrica: Journal of Sustainable Dryland Agriculture, 10(2), 75–82.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Rencana strategis Kementerian Pertanian 2020–2024. Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020–2024: Salinan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Perkembangan tenaga kerja dan produktivitasnya pada sektor pertanian Indonesia. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). Ringkasan rancangan awal RPJMN 2025–2029. Kementerian PPN/Bappenas.
- Mariati, R., & Nugroho, A. E. (2022). Penyusunan kebijakan untuk mendorong motivasi generasi muda berwirausaha di bidang pertanian. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 9(2), 95–103.
- Marpaung, N., & Bangun, I. C. (2023). Pentingnya regenerasi petani dalam modernisasi pertanian. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 2(2), 27–33. https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14195
- Mulyana, E., Bidarti, A., Yamin, M., Sari, S. N., & Harliani, D. O. (2022). Edukasi hidroponik sebagai pertanian alternatif bagi calon petani milenial di Desa Meranjat II, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(5), 5013–5018.
- Oktafiani, F., Nurhayati, S., & Oktaviani, R. (2021). Sulitnya regenerasi petani pada generasi muda. Jurnal Studi Muda, 10(1).
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025). Kementerian PPN/Bappenas.
- Rachmawati, R. R. (2020). Smart farming 4.0 untuk mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri, dan modern. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 38(2), 137–154. https://doi.org/10.21082/fae.v38n2.2020.137-154
- Tualar, S. (2019). Percepatan transformasi teknologi dan inovasi smart farming dan petani milenial untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing pertanian Indonesia. Conference Paper, 1–10.